

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT-SURIAH

Bab ini menjelaskan kronologi konflik Suriah. Penjelasan dimulai dari hubungan baik Amerika Serikat-Suriah hingga penyebab terjadinya konflik Suriah. Setelah terjadi konflik akan diperdalam faktor penyebab panjangnya jangka waktu konflik di Suriah 2011-2017, beserta dukungan pihak-pihak yang terlibat selama enam tahun tersebut, yakni Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi dan Iran sejak 2011.

A. Hubungan Baik Amerika Serikat dengan Pemerintah Suriah

Setelah Perang Dunia II, intervensi AS di Suriah bersifat rahasia. Fakta ini sangat terbalik tatkala berbondong-bondongnya misionaris yang datang ke Syam pada tahun 1820. Para misionaris menguatkan opini di tengah orang-orang Arab untuk melepaskan diri dari Ottoman. Dorongan ini tidak terlepas dari 14 poin yang disampaikan Preseiden Widrow Wilson. Tentunya, dorongan ini terlepas dari usulan yang dikirimkan Wilson pada tahun 1919. Dua dekade kemudian, keinginan Wilson diwujudkan oleh Truman, yakni pada 1945 Amerika Serikat bekerjasama dengan Inggris untuk menggagalkan upaya Prancis yang hendak merebut kembali protektorat yang telah dibatalkan dan mendesak Prancis untuk menerima kemerdekaan Suriah (Little, 1990, p. 52).

Sayangnya apresiasi atas bantuan Amerika Serikat tidak berlangsung lama. Setahun kemudian, apresiasi tersebut disusul kritik terhadap kebijakan Amerika Serikat di Palestina. Awalnya, Roosevelt telah menyakinkan Quwatly bahwa Amerika Serikat akan berkonsultasi dengan Suriah sebelum mengambil tindakan terhadap tanah Palestina. Namun, pada tahun 1947, Truman justru mengaminkan pembagian

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membagi tanah Palestina tersebut. Menteri Luar Negeri Suriah, Faris Khouri mengeluh dan mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang “keluar dari jalur Orang-orang Arab”. Persetujuan PBB tersebut mengguncang Suriah dan mengakibatkan sekitar 2.000 warga Suriah berkumpul melempari kedutaan AS, membakar dan merobohkan bendera AS. Penolakan Suriah semakin serius, selama enam bulan berikutnya, lebih dari 8.000 gerilyawan menyusup ke Palestina melalui bantuan Suriah. Namun, pasca Perang Mei 1948, AS hanya menganggap ledakan anti-Amerika di Damaskus hanya sebagai masa lalu. (Little, 1990, p. 53)

Dukungan Amerika terhadap Israel dalam konflik Palestina-Israel bukanlah tanpa sebab. Faktor kepentingan geopolitik, ekonomi, budaya dan agama telah melanggengkan hubungan keduanya. Sebut saja Marthin Luther, tokoh pembaharuan agama Kristen asal Jerman ini telah menjadi inspirasi dalam kehidupan di AS khususnya hubungan Yahudi-Kristen Protestan. Albert Hourani dalam tulisan mengatakan bahwa Kitab suci Yahudi, Taurat dan Perjanjian Lama memiliki pengaruh yang besar dalam pola pikir dan budaya migran Eropa pertama ke AS. Mereka lantas mengadopsi bahwa kaum Yahudi harus kembali ke Palestina. Bahkan jika dilihat dari kebijakan politik AS sejak berdirinya. Maka mereka mengadopsi kebijakan zionis (Rahman, 2016).

Geografis Israel yang terletak ditengah negara-negara Arab menjadi perpanjangan tangan implementasi nilai-nilai dan budaya Barat dalam politik (demokrasi), hukum (Hak Asasi Manusia), ekonomi dan sosial. (Rahman, 2016) Israel, bukanlah satu-satunya sekutu Amerika di Timur Tengah. Turki menjadi bagian penting dalam kebijakan penahanan Truman di Timur Tengah. Turki telah terlibat dalam perselisihan dengan Suriah terkait Distrik Alexandretta (sekarang Iskandarun yang terletak di Provinsi Hatay, Turki), Provinsi paling utara Suriah yang diserahkan Perancis kepada Turki, pada malam Perang Dunia II. Perselisihan Amerika-Suriah atas Turki dan Israel

menghambat rencana Amerika untuk mengendalikan petrole-
um Arab Saudi melalui ARAMCO (Perusahaan Minyak
Amerika Arab). Pada akhir 1945 rencananya AS akan mem-
bangun Jalur Pipa Trans (TAPLINE) dari ladang minyak
Dhahran ke Mediterania. Sayangnya konsesi untuk melewati
jalur Pantai Suriah menemui jalan buntu. Puncaknya, dihub-
ungkannya pembangunan TAPLINE dengan masalah Palestina.
CIA memperkirakan adanya kampanye dari kelompok na-
sionalis Suriah untuk merebut Alexandretta dari Turki (Little,
1990, pp. 54-55).

Sebelum Zaim diangkat menjadi Presiden. Zaim sempat
bertemu dengan Meade untuk membahas pasukan yang men-
dukung kediktatoran. Penjabat Amerika menyadari bahwa
Zaim adalah tipe diktator dan memiliki sikap anti-Soviet yang
kuat, selain itu Zaim juga menyatakan kesediaannya untuk
berdamai dengan Israel dan dia menginginkan bantuan militer
Amerika. Pada 30 Maret 1949, Zaim berhasil melakukan ku-
deta dengan menangkap Quwatly dan Azm.

Pasca naiknya Zaim menjadi pemimpin baru, kinerja Zaim
sesuai dengan harapan Amerika. Diantara kebijakannya, Zaim
siap memberikan permukiman kepada 250.000 pengungsi Pal-
estina di Lembah Jazirah, di sepanjang perbatasan Irak. Pada
pertengahan Mei, Zaim juga menyetujui konsesi TAPLINE
dan diikuti dengan kampanye anti Soviet dengan pelarangan
terhadap Partai Komunis dan menahan puluhan pembangkang
sayap kiri. Tak hanya itu, pada bulan Juli Zaim menarik se-
luruh klaim Suriah terhadap Turki atas Alexandretta dan
kemudian menandatangani gencatan senjata antara Suriah-
Israel. Tidak ada makan siang gratis, semua yang dilakukan
oleh Zaim menuntut Amerika untuk memberikan paket bantu-
an militer dan ekonomi senilai \$100 juta. Sayangnya, sebelum
dilaksanakan, Zaim digulingkan dan dieksekusi pada 14
Agustus oleh Kolonel Sami Hinnawi (Little, 1990, pp. 57-58).

Naiknya Hinnawi ke tampuk kekuasaan, mengkhawatirkan
Truman akan kebijakan Zaim yang pro-Amerika. Sehingga

untuk mengantisipasi sikap kontra Amerika, Truman bersedia mengakui rezim Hinnawi dengan jaminan akan dilaksanakan “*pemilihan bebas*” pada pemilihan berikutnya. Sayangnya, Hinnawi terlebih dahulu mengambil sikap atas pelanggaran Israel dan Hinnawi meminta Amerika Serikat untuk membujuk Israel agar memenuhi kewajibannya. Ketika pemilihan umum yang telah dijadwalkan terlaksana pada 15 November, inteljen militer Amerika Serikat menemukan, bahwa komunisme sedang bersiap untuk memberikan pengaruhnya di pemerintahan Suriah yang baru. Pemungutan suara, tidak diharapkan. Sebab pemenangnya adalah Partai Populis Hinnawi yang merencanakan akan adanya Serikat antara Suriah dan Dinasti Hashemite. Menanggapi hal tersebut, Kolonel Adib Shishakli melakukan kudeta ketiga Suriah dan membatalkan rencana federasi Suriah-Irak (Little, 1990, p. 58).

Saat Eisenhower duduk ditampuk kekuasaan, ia mencoba melawan Soviet melalui perantara orang Arab yakni dengan ofensif ekonomi. Awalnya Washington menawarkan pembiayaan Bendungan Aswan Mesir dan bersedia mensubsidi pembangunan kilang minyak Suriah di Homs. Keberhasilan kedua proyek ini bergantung pada Robert Anderson, seorang pengusaha minyak dan mantan wakil sekretaris pertahanan yang dikirim Eisenhower secara rahasia ke Timur Tengah pada 1956 untuk mendamaikan Arab-Israel. Sayangnya harapan ini di hambat oleh Nasser (Little, 1990, p. 65)

Awal tahun 1950-an, tak satupun dari Rezim Suriah yang disukai oleh Amerika Serikat. Walaupun mengalami berbagai kegagalan untuk melawan rezim Suriah, Amerika Serikat tak pernah putus asa. Dulles dan Eisenhower prihatin dengan kondisi Suriah yang semakin pro-Soviet. Hingga Amerika Serikat memberanikan diri berdikusi dengan Inggris merencanakan kesepakatan rahasia. Operasi Straggle pada akhir Oktober 1956 menjadi langkah awal untuk memicu terjadinya kudeta. Turki, Dinas Rahasia Inggris (*British Secret Service*) dan CIA akan memulai kegiatan mereka dengan melakukan kekerasan di perbatasan Negara Suriah serta janji-janji yang

diimengi oleh Amerika Serikat. Sayangnya operasi ini gagal begitu pula dengan Operasi Wappen. Kegagalan ini menyebabkan Amerika Serikat menjadi bulan-bulanan masyarakat Suriah. Mereka mengusir CIA dan mengawasi gerak-gerik Kedutaan Amerika Serikat (US Foreign Policy in Perspective, n.d.). Pada 28 Maret, Eisenhower menyerukan penggulingan Bendungan Aswan dan mengalahkan rezim pro-Nasser yang semakin meningkat di Suriah (Little, 1990, p. 65).

Tahun-tahun sulit bagi hubungan keduanya agak mereda, selama 1990-2001 Amerika Serikat menjalin hubungan baik dalam tingkat tertentu dengan Pemerintah Suriah (US Department of State). Tatkala Amerika Serikat dan Uni Soviet menginisiasi perdamaian konflik di Timur Tengah, khususnya menindaklanjuti perjanjian Mesir-Israel pada Konferensi Madrir tahun 1991. Amerika Serikat dan Uni Soviet gencar mendorong negara-negara Arab untuk menandatangani perjanjian mereka dengan Israel (BBC, 2013). Negara-negara Arab yang hadir adalah Israel, Mesir, Lebanon dan Suriah, serta delegasi gabungan Yordania-Palestina. Ini menjadi momen berharga bagi semua pihak, sebab untuk pertama kalinya semua pihak berkumpul untuk melaksanakan negosiasi langsung atas konflik Arab-Israel (United States Department of State).

Hubungan keduanya memburuk dari tahun 2003 hingga awal 2009. Perhatian Amerika Serikat tertumpu pada kegagalan pemerintah Suriah untuk mencegah Suriah tempat titik transit bagi pejuang Asing yang hendak masuk Irak (US Department of State). Pada Mei 2004, Bush mengambil tindakan tegas dengan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Suriah. Sanksi ekonomi ini mencakup hampir seluruh produk ekspor Amerika Serikat kecuali, makanan, obat-obatan dan pelarangan penerbangan antara Suriah dan Amerika, kecuali dalam keadaan darurat. Sanksi ini berasal dari tuduhan bahwa Suriah telah gagal menangani kelompok-kelompok teroris (Hamis dan *Islamic Jihad*) yang memerangi Israel dan menghentikan aliran pejuang asing ke Irak (Marquis, 2004).

Pada tahun 2005, Amerika Serikat menarik duta besarnya untuk Suriah. Saat itu, Amerika Serikat menyalahkan Suriah atas terbunuhnya perdana menteri Libanon, Rafiq al-Hariri. Jadi, sejak 2005 hingga 2009 Amerika Serikat tidak memiliki perwakilan di Suriah (Landis, n.d.).

Saat terpilihnya Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat pada Januari tahun 2009, Obama mencoba merapatkan kembali hubungannya dengan Pemerintah Suriah melalui pengiriman duta besarnya, Ford ke Damaskus. Namun, upaya ini tidak berlangsung lama, sebab saat terjadinya demonstrasi di Suriah ada ancaman yang mengincar Ford, hingga dia ditarik kembali ke Washington (MacAskill, 2011)

B. Konflik Suriah

Negara Republik Suriah dikenal juga dengan Negara Republik Monarki Suriah. Walaupun secara resmi Suriah disebut sebagai negara republik, faktanya negara tersebut diperintah dalam bentuk keturunan. Menurut Kuncahyono dalam Musim Semi di Suriah Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi. Rezim Assad dibangun atas empat pilar: Kekuasaan berada pada genggaman Klan Al-Assad, kedua; menyatukan minoritas alawite, ketiga; mengatur seluruh aparatur militer-inteljen; dan keempat Partai Ba'ath memonopoli sistem politik.(Kuncahyono, 2012, p. 78).

Sejak Hafez Assad merasa semakin mendekati ajalnya, Hafez segera mempersiapkan Basil Assad sebagai penggantinya, namun takdir berkata lain. Basil wafat pada tahun 1994 sebelum dia diangkat menjadi pengganti ayahnya. Hafez mengambil tindakan cepat dengan meminta Bashar Assad kembali dari Inggris, untuk menggantikan posisi “putra mahkota”.

Setelah kembali dari Inggris, Bashar Assad dilatih secara bertahap untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai presiden. Persiapan yang dilalui Bashar Assad berlangsung selama tiga

tahap. Tahap *pertama*, membangun kekuatan dukungan bagi Bashar Assad dalam bidang militer dan perlindungan. Upaya yang ditempuh Assad untuk meningkatkan kredibilitas dalam bidang militer, dilakukan dengan masuk di akademi militer di Homs, yang terletak di Utara Damaskus pada tahun 1994. Lima tahun menempuh pendidikan militer Bashar menjadi colonel. Tahap *kedua*, memperbaiki dan memperkuat *image* Bashar Assad di depan public. Tahap *ketiga*, memperkenalkan Bashar Assad lebih dalam, dengan mekanisme untuk mengatur negara (ABM, 2013, p. 163).

Bersamaan dengan berkembangnya karir militer, Bashar Assad mendapatkan banyak kekuasaan. Ia pernah menjadi penasihat politik Presiden Hafez al Assad, kepala biro yang menangani keluhan warga, dan aktif mengkampanyekan antikorupsi. Kampanye inilah yang membantu Bashar Assad menyingkirkan lawan potensialnya sebagai presiden (ABM, 2013, p. 163)

Naiknya Bashar Assad menjadi orang nomor satu di Suriah pada tahun 2002 menjadi harapan bagi masyarakat Suriah. Latar belakang pendidikan dan lingkungan modern membawa harapan, bahwa Bashar akan menjadi sosok yang berbeda dengan ayahnya. Pada awal masa pemerintahan, Bashar al-Assad memperbaharui kebijakan yang diterapkan ayahnya. Seperti memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak mengikuti wajib militer, melakukan reformasi politik dengan mengembalikan orang-orang yang diasingkan, dan mengembalikan hak berbicara rakyat Suriah (Kuncahyono, 2012, pp. 70-74). Dalam situs resminya, Bashar Assad mengatakan bahwa dia telah membangun zona perdagangan bebas, mengizinkan koran dan universitas swasta, dan dia berjuang mengatasi korupsi serta pemborosan yang dilakukan pemerintah (ABM, 2013, p. 164).

Sayangnya perubahan ke arah keterbukaan ini tidak berlangsung lama. Pada pertengahan 2001, entah dengan alasan apa, Bashar Assad melawan para pembaharu. Kaum reformis

dianggap sebagai musuh yang mengkhiasi negara (Kuncahyono, 2012, pp. 70-74). Tidak tanggung-tanggung pada tahun 2007 sebuah undang-undang dikeluarkan yang berisi mewajibkan warnet merekam seluruh komentar yang diposkan pengguna pada ruang obrolan. Sedangkan situs web seperti Wikipedia Arab, Youtube dan Facebook, diblokir sejak tahun 2008 sampai Februari 2011 (ABM, 2013, p. 164).

Melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan Assad sebenarnya, kepemimpinan Assad juga tidak terlepas dari empat pilar yang telah disebutkan dalam menopang kepemimpinannya. Sama seperti Hafez, Assad memberlakukan undang-undang darurat, meskipun ia menjanjikan pembaruan politik dan ekonomi. Bashar Assad menjadi titisan ayahnya. Tindakan menekan, menindas setiap perlawanan, setiap suara yang berbeda, aspirasi politik yang berseberang dengannya tetap dilakukan. Pada tahun 2004, Bashar Assad mengerahkan militernya untuk menumpas kelompok Kurdi. Hasilnya lusinan nyawa melayang dan protes dapat diredam. (Kuncahyono, 2012, pp. 80-81).

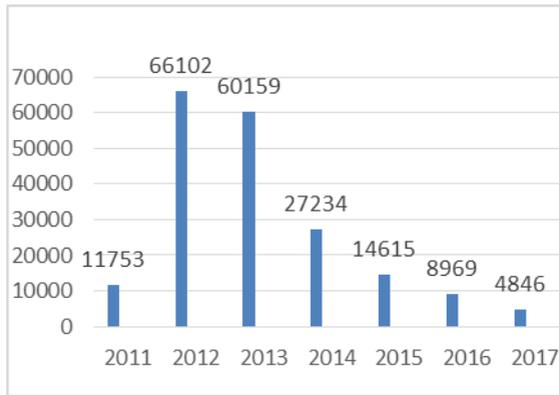
Mengutip dari Abdel Halim Khaddam yang pernah menjadi wakil presiden untuk Bashar dan ayahnya dalam Kompas (2019), bahwa Bashar Assad muda adalah seorang yang brutal dan tidak tegas. Ia mendengarkan semua orang, namun dalam sekejap membantah dan melupakannya (Kompas.com, 2012).

Pada waktu bersamaan Musim Semi Arab 2011 telah berhasil menggulingkan pemimpin diktator Tunisia dan Mesir. Keberhasilan tersebut memberi harapan pada aktivis pro-demokrasi Suriah. Pada bulan Maret, aksi damai dilakukan oleh 15 anak laki-laki dengan membuat grafiti mendukung Musim Semi Arab. Sayangnya Pemerintah Suriah memilih untuk menangkap, menyiksa dan membunuh salah satu bocah lelaki, 13 tahun secara brutal. Tidak terima dengan tindakan Assad, masyarakat melakukan aksi menolak sikap Assad. Lagi-lagi Assad memilih untuk membunuh ratusan demon-

stran dan lebih banyak lagi yang dipenjara (MatamataPolitik, 2019).

Demonstrasi yang berlanjut menjadi konflik bersenjata ini menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh, laporan dari Syirian Network for Human Right (SNHR) menyebutkan setidaknya pada 2011 hingga 2017 terdapat 193.660 sipil yang terbunuh, disebabkan oleh serangan Rezim Suriah (SNHR).

Gambar 3. 1 Korban Konflik Suriah Tahun 2011-2017



Sumber : <http://sn4hr.org/syria-map-snhr/>

Tahun 2012 menjadi puncak banyaknya sipil yang terbunuh. Setidaknya ada sekitar 66.185 korban sipil yang terbunuh, dengan detail 66.102 disebabkan oleh serangan Rezim Suriah; 21 korban sipil yang terbunuh disebabkan Hay'at Tah-rir al Sham; korban yang disebabkan oleh Faction of the Armed Opposition sebanyak 28 orang; 25 orang yang terbunuh disebabkan oleh SDF; dan 9 orang yang terbunuh akibat serangan dari pihak lain (SNHR).

Pemetaan korban yang dibunuh oleh rezim sejak 2011-Januari 2019, jika diurutkan berdasarkan kota. Maka, korban terbesar berada di Kota Damaskus (45.728 Orang), disusul Aleppo (31.786 Orang) dan Homs (26.527). Tercatat, bahwa di Damaskus spesifikasi korban berdasarkan gender, terbanyak

berasal dari laki-laki dewasa (38.807 Orang), anak-anak dibawah 18 tahun (4.492 Orang) dan wanita dewasa (2.429 Orang). Untuk korban tersedikit berada di Kota Tartus dengan 1.020 orang yang terbunuh (SNHR).

C. Fenomena Perang Proksi

Untuk memahami konflik Suriah tidak dapat dilihat dari satu aktor, Bassel Oudat menulis dalam M. Najih Arromadloni membagi aktor menjadi tiga: lokal, regional dan global.

Pada tataran lokal aktor yang terlibat adalah rezim Bashar Assad, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan kelompok pemberontak yang afiliasinya amat beragam. Afiliasi dari kelompok-kelompok tersebut yakni kelompok yang dibentuk atas inisiatif Amerika Serikat di Doha, Qatar dan berafiliasi pada Ikhwanul Muslimin diantaranya Free Syria Army (FSA), Syrian National Council (SNC) dan Syrian National Council for Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF). *Kedua*, kelompok yang memiliki keinginan untuk membentuk Khilafah, yaitu, Ahrar al-Sham, Liwa Jaish Muhammad, Kataeb, Halab al-Shahba, Liwa' al-Tauhid, Ahrar Souria, al-Harakah al-Fajr al-Islamiyah, Dar al-Ummah, Liwa' al-Nasr, Liwa' Dar al-Islam, Jabhat al-Nusrah, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini berafiliasi dengan Al Qaeda. Kelompok *Ketiga*, kelompok oposisi ini tergabung dalam *National Coordination Body for Democratic Change*. Dalam perjuangannya, kelompok ini tidak menempuh jalan kekerasan. (Arromadloni, 2017)

John Allen Gay, seorang editorial dalam The National Interest menyimpulkan bahwa kekuatan lokal relatif rapuh, sebab kadang-kadang pemerintah tampak menang. Namun dilain kesempatan pemerintah tampak kalah (Gay, 2015). Pada tataran regional kekuatan negara seperti Arab Saudi dan Iran lebih terlihat unggul, diikuti oleh Qatar, Turki dan Israel yang selalu siap sedia berebut pengamanan, pengaruh politik dan ekonomi di kawasan yang rakyatnya tercabik-cabik. Nega-

ra-negara ini siap bertempur hingga berakhirnya Suriah (Arromadloni, 2017).

Sedangkan dalam kancan internasional, krisis Suriah telah menarik ulur hubungan Rusia-Amerika sebagai pemegang hak veto (Arromadloni, 2017). Tak hanya itu, konflik ini juga turut melibatkan Iran dan Arab Saudi. Berikut akan dibahas peran Rusia dan Amerika dalam Konflik Suriah.

Rusia

Rusia adalah sekutu kuat bagi Rezim Bashar Assad. Bagi Rusia, kehadirannya dalam konflik Suriah telah menjadi peluang untuk mengembalikan eksistensi Rusia di pentas dunia. Militer Rusia sudah terbebas dari beban psikologis akibat kekalahannya pada Perang di Afghanistan (Mashuri, 2019).

Keinginan Rusia melindungi Assad bukan karena hubungan militer atau ekonomi yang signifikan tetapi baginya, Pemerintahan Suriah yang kuat dapat menjadi solusi alternatif melawan kelompok Islam radikal (Ezrow, 2018).

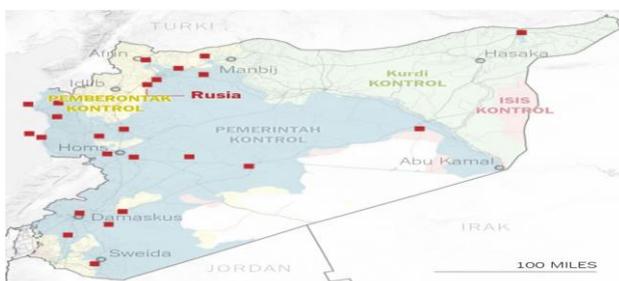
Komitmen Rusia untuk turut serta dalam konflik Suriah tertuang dalam jaminan bantuan militer menurut Tingley (2013), bantuan militer diwujudkan melalui *military hardware* maupun pelatihan militer. Dalam konflik Suriah, Rusia memberikan bantuan militer dalam bentuk pelatihan militer, peralatan militer dan bantuan serangan udara militer Rusia yang ditempatkan di Suriah atau yang diberangkatkan langsung dari pangkalan militer di Federasi Rusia (Abdullah, 2017).

Awal tahun 2015 menjadi titik balik bagi Bashar Assad-terutama di Kota Idlib-yang dipaksa mengakui, bahwa kekalahan pasukannya disebabkan kekurangan pasukan teroris. Sehingga Assad harus menyerahkan wilayah-wilayahnya (BBC, 2017). Melihat kondisi ini, Rusia memandang, Rezim Assad membutuhkan bantuan material langsung untuk mempertahankan rezim mereka. Sehingga pada September 2015, di

bawah komando Vladimir Putin, Rusia mengerahkan pasukan ke Suriah. Aksi yang dilakukan Rusia dilegitimasi berdasarkan aturan formal dan norma internasional yang merujuk pada Piagam PBB tahun 1945 (unic.un.org). Hal ini mengejutkan komunitas Internasional, sebab dalam sekejap kekuatan militer seimbang dan berbalik menguntungkan Rezim Assad (BBC, 2017).

Rusia mempersiapkan serangkaian operasi dengan pembangunan pangkalan di selatan Latakia dan penyebaran kekuatan (Tammiga, 2015). Operasi militer berlangsung sejak 30 September 2015. Selain itu, Rusia juga memiliki pangkalan angkatan laut di pelabuhan kota Tartus (Tempo.co, 2018). Adapun perangkat militer yang dikirim Rusia diantaranya Tank tipe T-90, alat tempur dan artileri yang ditempatkan di sana untuk melindungi pangkalan udara dari serangan kelompok IS (Islamic State) maupun kelompok oposisi lainnya. Rusia juga mengirimkan sekitar 300-500 personil marinir untuk bertahan dari serangan musuh dan mempertahankan kepemimpinan rezim. Tak hanya itu, Rusia juga mengirimkan pesawat pengebom Su-24 dan Su-34, pesawat tempur tipe Su-25, helikopter Mi-24 dan pesawat pengintai ke Suriah (Tammiga, 2015, pp. 1-2).

Gambar 3. 2 Penyebaran Pasukan Rusia di Suriah



Sumber:

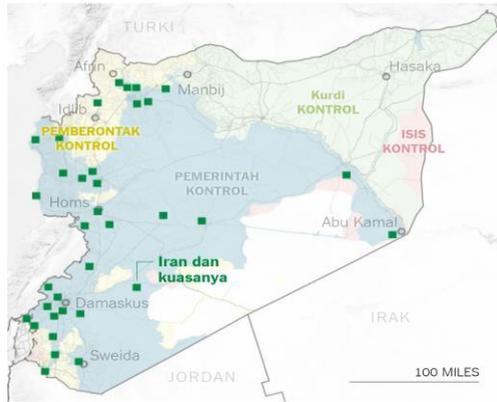
<https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/11/world/middleeast/syria-military-us-russia-iran.html>

Iran

Sejak pecahnya perang Suriah, Iran mempertimbangkan dipihak mana ia harus berdiri. Memilih bergabung dengan Arab dengan konsekuensi akan dipandang sebagai munafik atau menahan diri dari mendukung rezim Assad yang tanpa jaminan, jika pemerintahan baru akan memiliki hubungan baik dengan Iran (Goodarzi, 2013, p. 50). Mengingat kondisi, Iran menempatkan posisi menjadi pendukung utama Presiden Bashar al Assad. *The Iranian Revolutionary Guards Corps* (IRGC) telah terlibat dalam beberapa pertempuran besar di beberapa negara, termasuk memberikan dukungan kepada pasukan pemerintah Suriah melawan oposisi (Jedinia, 2019).

Geografis Suriah yang strategis tidak pernah diabaikan Iran. Suriah telah menjadi jalur milisi Syiah Hizbullah. Iran pun khawatir dengan komposisi pemerintahan, jika Bashar al Assad turun. Maka, potensi mayoritas Arab Sunni akan semakin besar dan ini akan menguntungkan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Potensi bahaya ini direspon oleh Iran melalui media Suriah dengan memberikan kredit sebesar \$1 miliar atau yang disebut "*credit facility agreement*" dengan Iran pada Januari 2013. Lima bulan kemudian bantuan kembali datang, Iran memberikan kredit sebesar \$ 3 miliar yang digunakan untuk pembelian bahan bakar dan sejenisnya. Bantuan lain yang diberikan Iran dalam bidang militer berupa bantuan militer, pelatihan inteljen, dan kerjasama untuk memadamkan kerusuhan. Pemerintah Amerika Serikat melaporkan bahwa Teheran telah membentuk sebuah kelompok paramiliter yang kuat, berjumlah 50.000 orang Suriah yang dikenal dengan *Jaysh Al Shabi* (Tentara Rakyat) untuk membantu pasukan Pemerintah Suriah (Sadjadapour, 2013).

Gambar 3. 3 Penyebaran Pasukan Iran di Suriah



Sumber

<https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/11/world/middleeast/syria-military-us-russia-iran.html>

Arab Saudi

Arab Saudi telah menjadi sekutu pembantu terpenting bagi oposisi Suriah. Arab Saudi menyalurkan bantuannya dalam dua bentuk yakni bantuan militer dan bantuan dana. Pemerintah Riyadh mengirimkan kendaraan lapis baja salah satunya rudal antitank Konkurs yang diklaim mampu menembus pertahanan tank tercanggih (Anggoro, 2013). Selain itu, ada pula senjata dan senapan mesin yang diterima secara resmi oleh *Free Syrian Army* (FSA) (Moussaoui, 2014)

Tidak hanya senjata, Riyadh juga mengirimkan bantuan dana dengan penggajian FSA dalam bentuk mata uang dolar dan euro. Gaji yang diterima tentara pemberontak lebih tinggi dari gaji pegawai pemerintahan. Melalui mekanisme ini, Arab Saudi berharap akan banyak pegawai negeri Suriah yang bergabung bersama pemberontak (Moussaoui, 2014).

D. Bentuk Dukungan Amerika Serikat Terhadap Oposisi Suriah

Pembahasan terkait Suriah terus berlanjut, mulai kepemimpinan penguasa diktator, markas perkembangan kelompok ISIS dan retetan peristiwa yang rumit dan ruwet di Suriah telah menyebabkan kehadiran pihak asing dalam konflik tersebut. Sebut saja Amerika, sebuah negara adidaya yang terlibat dalam konflik Timur Tengah.

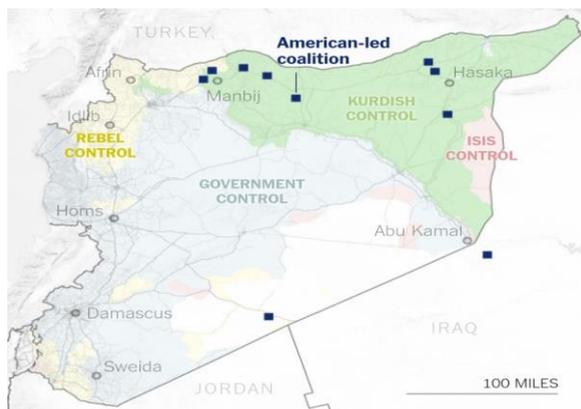
Selama Perang saudara di Suriah, Amerika Serikat mendudukkan posisinya sebagai pendukung demonstran atau oposisi yang menentang kepemimpinan Bashar Assad. Bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Suriah dibagi dua yakni, bantuan langsung dan bantuan tidak langsung. Bantuan langsung yang diberikan Amerika Serikat berupa laporan akurat mengenai peta kekuatan dan aktivitas yang akan dilakukan Rezim Assad, bantuan finansial yang dibutuhkan oleh oposisi, dan bantuan konsultan strategi dari badan-badan keamanan Amerika Serikat, seperti CIA. Sedangkan bantuan tidak langsung yang diberikan Amerika Serikat adalah pengumpulan dukungan internasional melalui PBB (Atika, 2017).

Bantuan finansial dan non finansial yang diberikan Amerika Serikat terhadap Oposisi Suriah terangkum dalam beberapa waktu. Pada 2012, Robert Ford, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Suriah menyatakan bahwa Amerika Serikat harus terlibat dalam konflik Suriah jika tidak ingin Suriah menjadi “Somalia atau Yaman” yang lain. Namun, bantuan pertama yang datang bukanlah seperangkat alat militer dan pasukan. Melainkan MERs (*Meals Ready to Eat*). Kekhawatiran pejabat Gedung Putih beralasan mereka khawatir jika persenjataan akan berakhir di tangan para pemberontak yang berafiliasi dengan Al-Qaeda (McKelvey, 2015). Selain MERs Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan, pengawasan udara dari militer Suriah, dan membentuk zona *Non-fly* (Schmitt, 2012). Keragu-raguan Amerika Serikat terkikis pada tahun 2013, ketika terjadi ancaman bagi Oposisi. Pada waktu itu, dilaporkan bahwa kota strategis Qusair jatuh

ke tangan pasukan pemerintah dan para pejuang dari milisi Hizbullah yang didukung Iran dilaporkan menyokong rezim (DW, 2013). Amerika Serikat tidak tinggal diam, Gedung Putih menandatangani hak otoritas CIA untuk melatih kelompok pemberontak di pangkalan Yordania. Tindakan Amerika Serikat bermula karena lobi intens yang dilakukan Raja Abdullah II dari Yordania dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Israel, yang menyatakan Amerika Serikat harus lebih aktif mengupayakan berakhirnya konflik Suriah (Mark Mazzetti, 2017).

Pada tahun 2015, John Kerry menemui Raja Salman di Riyadh. Baik Amerika Serikat maupun Arab Saudi berjanji akan terus melanjutkan dan meningkatkan dukungan bagi Oposisi Suriah. Koalisi Amerika Serikat telah menurunkan rudal anti-tank kepada FSA sejak Rusia menurunkan jet tempurnya, akhir September 2015. Disamping itu, penggunaan rudal TOW buatan Amerika telah mampu menghambat laju rezim Assad (Armandhanu, 2015).

Gambar 3. 4 Penyebaran Pasukan Amerika Serikat di Suriah



Sumber

<https://www.nytimes.com/interactive/2018/04/11/world/middleeast/syria-military-us-russia-iran.html>